**MATRIKS TARGET CAPAIAN**

**USULAN RENCANA AKSI NASIONAL**

**OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Komitmen** | : Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa |
| **Kementerian/LembagaPenanggung Jawab** | : Kementerian Dalam Negeri |
| **Kementerian/Lembaga Terkait** | : |
| **Bappenas** | : Direktorat Pembangunan Daerah |
| **CSO Mitra** | : Transparency International Indonesia |
| **Point of Contact Kementerian/Lembaga** | : |

| **Penanggung Jawab** | **Ukuran Keberhasilan** | **B06 (2023)** | **B12 (2023)** | **B18 (2024)** | **B24 (2024)** | **Data Dukung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kementerian Dalam Negeri** | Terpublikasi secara rincinya keuangan desa melalui website desa | Pembentukan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa | Adanya kesepakatan antara mitra daerah dengan perangkat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik |  | Pemerintah desa mempublikasi keuangan desa |  |
| Terpublikasinya informasi belanja pengadaan barang/jasa melalui kanal website pemerintahan desa |  | Penyusunan klasifikasi informasi di tingkat desa | Adanya rencana umum pengadaan di tingkat desa | Pemerintah desa mempublikasi rencana umum pengadaan barang dan jasa di tingkat desa |  |
| **Kementerian Dalam Negeri** | Mendorong adanya kanal pengaduan yang lebih efektif | Adanya komitmen dari perangkat desa dalam pengelolaan pengaduan |  | Penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan | Implementasi pengelolan pengaduan |  |
| **Organisasi Masyarakat Sipil** | Terpublikasi secara rincinya keuangan desa melalui website desa | Pendampingan desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik dengan pembentukan PPID desa | Pendampingan desa dalam penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik | Pendampingan penatausahaan dalam pencatatan pendapatan dan pengelolaan keuangan desa | Pemereintah desa mempublikasi informasi keuangan desa |  |
| Terpublikasinya informasi belanja pengadaan barang dan jasa melalui kanal website pemerintahan desa | Peningkatan kapasitas kepada PPID Desa | Pendampingan desa dalam penyusunan rencana belanja pengadaan barang dan jasa desa | Penyusunan matrik rencana belanja desa | Pemerintah desa mempublikasi rencana umum belanja desa setiap tahunnya |  |
| Mendorong adanya kanal pengaduan yang lebih efektif | Pendampingan Perangkat Desa dalam pembentukan tim pengelola pengaduan | Peningkatakan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan pengaduan di tingkat desa | penyusunan Standar Operational Prosedur dalam pengelolaan pengaduan. |  |  |
| Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa | Adanya kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawasi keuangan desa | Tersedianya modul pemantauan sistem keuangan desa | Peningkatan Kapasitas warga desa dalam pengawasan sistem keuangan desa |  |  |